

Renja Dinkannak 2023



2023

Renja

Dinas Perikanan dan Peternakan

Jl. Gatot Soebroto No.108 Purwokerto

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINKANNAK TAHUN LALU.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinkannak Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinkannak.....	9
2.2. Analisis Kinerja Perangkat Daerah.....	20
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinkannak.....	23
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	29
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.....	39
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinkannak.....	41
3.3. Program dan Kegiatan.....	42

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 51

BAB V PENUTUP 59

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel T-C29	Rekapitulasi evaluasi renja dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2021 Dinas Perikanan dan Peternakan	11
Tabel T-C30	Target Indikaor Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Tahun sebelumnya	23
Tabel T-C31	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Banyumas	31
Tabel T-C 32	Usulan Pemangku Kepentingan Tahun 2022	
Tabel T-C 33	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Banyumas	44
Tabel T-C 34	Matrik Tahun 2022 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Kabupaten Banyumas	53

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap perangkat daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2023. Renja merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dalam Pasal 2 yang berbunyi Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD; RPJMD ; Renstra SKPD; RKPD; dan RENJA SKPD.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 - 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 yaitu :

” Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri”

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi focus kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas yaitu:

Misi 3 : *Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.*

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

I.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 adalah:

1. Menentukan program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas dengan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2023.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

2. Merumuskan keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas selama Tahun 2023.

I.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan Pemerintah. Jadi indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,** berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional. Tantangan dan peluang serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD,** menguraikan proses yang dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dan analisis kebutuhan serta penjelasan proses tersebut dilakukan.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,** dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional,** telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah,** perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan kegiatan,** berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menguraikan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas rancangan awal Renja dapat dilihat dalam matrik renja Perangkat Daerah.

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINKANNAK TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINKANNAK TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINKANNAK

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana,

sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan target kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan tahun 2021 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021. Jumlah anggaran belanja pada APBD Induk Tahun 2021 sebesar Rp 15.919.573.276,- terdiri dari Pegawai Rp 10.666.000.896,- dan Belanja Barang dan Jasa Rp 5.253.572.380,- Dalam pelaksanaannya terjadi refocusing anggaran dampak pandemi covid 19 menjadi Rp 12.791.190.702 Penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.109.783.676 atau sebesar 94,67 %.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas pada tahun anggaran 2021 telah melaksanakan seluruh program yang menjadi tanggung jawabnya, yaitu terdiri dari 9 program dan 30 kegiatan dengan 57 Sub Kegiatan Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas direpresentasikan oleh capaian indikator kinerja. Rekapitulasi evaluasi hasil kinerja tahun lalu dapat dilihat dalam table T-C.29 sebagai berikut :

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021
Dinas Perikanan dan Peternakan**

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan (n-2) Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) Tahun 2022 (Renstra Perubahan)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Target Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah (n-2) Tahun 2021	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
[TUJUAN] Meningkatnya Produksi Perikanan dan Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	1,5	1,5	1,76	117,33	1,5	7,23	96,4
	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	3	2,94	98	3	11,4	76
[SASARAN] Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1,5	1,5	2,01	134	1,5	6,19	87,6
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	2831,31	932,53	937,2	100,5	1,5	2758,79	97,44
[KEGIATAN] Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok nelayan yang naik kelas	%	10	10	10	100	10	10	100
[SUBKEGIATAN] Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	RTP	57	5	8	160	26	8	14
[PROGRAM] PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	%	50	10	20	200	10	40	80
[KEGIATAN] Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pokmaswas yang terbentuk	Kelp.	5	1	1	100	1	3	60

[SUBKEGIATAN] Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nelayan yang dibina	orang	250	50	50	100	50	150	60
[SASARAN] Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,5	1,5	1,73	115,33	1,5	1,73	115,33
[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	33.959,82	11.095,37	11.120,99	100,23		32.819,79	96,64
[KEGIATAN] Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang naik kelas	%	5	5	5	100	5	5	100
[SUBKEGIATAN] Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah unit usaha pembudidaya ikan yang mendapatkan sertifikat CPIB/CBIB	unit	60	20	20	100	20	40	66,66
[KEGIATAN] Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen Analisa Usaha Perikanan Budidaya yang disusun	Dokumen	9	3	3	100	3	3	33,33
[SUBKEGIATAN] Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kawasan budidaya perikanan yang dibina	Kawasan	3	1	1	100	1	2	66,67
[SUBKEGIATAN] Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih budidaya air tawar yang diproduksi	ekor	1.369.228.000	446.720.000	450.921.320	100,94	450.921.320	1.297.641.320	94,77
[SUBKEGIATAN] Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian penyakit terlapor yang ditangani	%	90	90	100	111,11	90	90	100
[PROGRAM] PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	588,49	192,29	198,48	103,22		565,35	96,07
[KEGIATAN] Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi kelayakan pengolahan hasil perikanan yang dibuat	Dokumen	3	1	1	100	1	1	33,33

[SUBKEGIATAN] Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang mengajukan ijin	Pelaku usaha	25	5	5	100	5	10	40
[SASARAN] Meningkatnya Produksi Peternakan	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	%	3	3	2,94	98	3	2,94	98
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Populasi Ternak	%	3	3	2,94	98	3	2,94	98
[KEGIATAN] Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah penggunaan sarana peternakan (hibah) yang diawasi	keg	3	1	1	100	1	1	33,33
[SUBKEGIATAN] Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Sarana dan prasana peternakan yang diberikan	paket	6	2	2	100	2	2	33,33
[KEGIATAN] Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi ternak dan HPT unggul yang disusun	dokumen	3	1	1	100	1	1	33,33
[SUBKEGIATAN] Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah produksi calon bibit ternak yang dihasilkan	ekor	46	9	9	100	16	15	32,6
[PROGRAM] PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kawasan ternak yang dikelola	%	20	20	20	100	20	20	100
[KEGIATAN] Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan sumber bibit ternak yang dibina	kawasan	1	1	1	100	1	1	100
[SUBKEGIATAN] Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah kelompok perbibitan dalam kawasan yang difasilitasi prasarana	Kelp.	12	4	4	100	4	4	33,33
[PROGRAM] PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dokumen Peta sebaran penyakit hewan	Dokumen	3	1	1	100	1	1	33,33

[KEGIATAN] Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kejadian penyakit hewan	%	10	10	10	100	10	10	100
[SUBKEGIATAN] Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang diobati	ekor	1050	350	430	122,8	350	430	40,95
[KEGIATAN] Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian penyakit hewan terlapor yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	100
[SUBKEGIATAN] Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kejadian penyakit hewan yang ditangani	kasus	13500	4500	6.403	152,57	4500	6403	152,57
[KEGIATAN] Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang mengajukan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	unit	6	2	2	100	2	2	33,33
[SUBKEGIATAN] Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Dokumen Pengajuan Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang diverifikasi	Dokumen	6	2	8	400	2	8	400
[KEGIATAN] Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang dihasilkan	kg	1.200.000	400.000	427.205	107	400.000	2.366.815	197
[SUBKEGIATAN] Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah RPH yang difasilitasi sarpras	unit	6	6	6	100	6	6	100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	75	75	75	100	75	75	100
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100

[KEGIATAN] X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	10	4	4	100	4	8	80
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	7	3	3	100	3	6	85,7
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	1	1	100	1	2	66,66
[KEGIATAN] X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	jenis	2	2	2	100	2	2	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	orang	80	80	80	100	80	80	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	orang	14	14	14	100	14	14	100
[KEGIATAN] X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	jenis	2	2	2	100	2	2	100
[SUBKEGIATAN] Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	bulan	36	12	12	100	12	24	66,66
[SUBKEGIATAN] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	kali	300	100	100	100	100	200	66,66
[KEGIATAN] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	jenis	3	1	1	100	1	2	66,66
[SUBKEGIATAN] Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	unit	15	5	5	100	5	10	66,66
[KEGIATAN] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	jenis	2	2	2	100	2	2	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	bulan	36	12	12	100	12	24	66,66
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	orang	41	41	41	100	41	41	100

[KEGIATAN] X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	jenis	4	3	3	100	1	4	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	unit	78	78	78	100	78	78	100
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	unit	7	1	4	400	2	5	71,42
[SUBKEGIATAN] X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	unit	1	1	4	400	1	4	400

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan , pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perikanan budidaya, pengembangan perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang menjadi kewenangan daerah

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Dinas Perikanan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan umum kesekretariatan dan Teknis bidang Perikanan, bidang pengembangan perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan dan teknis bidang perikanan, bidang pengembangan perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan dan teknis bidang perikanan, bidang pengembangan perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dan teknis bidang perikanan, bidang pengembangan perikanan, bidang peternakan dan

- bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan dan teknis bidang perikanan, bidang pengembangan perikanan, bidang peternakan dan bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun struktur organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub bagian Perencanaan;
 - 2. Sub bagian Keuangan;
 - 3. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari:
 - 1. Seksi Budidaya dan Kelembagaan
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana dan Kesehatan Ikan
- d. Bidang Pengembangan Perikanan terdiri dari:
 - 1. Seksi Perikanan Perairan Umum ;
 - 2. Seksi Pengembangan Daya Saing ;
- e. Bidang Peternakan:
 - 1. Seksi Produksi dan Pakan Ternak :
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan;
- f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner:
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- g. UPTD;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara umum jenis pelayanan yang diberikan Dinas Perikanan dan Peternakan adalah informasi dan pemikiran strategis terkait teknis pembangunan dan kebijakan dibidang perikanan dan peternakan yang meliputi:

1. Peningkatan Produksi Perikanan;
2. Peningkatan produksi Peternakan;

Strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu:

1. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dengan meningkatkan pengelolaan budidaya dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan;
2. Meningkatkan produksi hasil tangkapan ikan di perairan umum dengan meningkatkan pengelolaan dan pengawasan perikanan tangkap;
3. Peningkatan produktivitas peternakan dengan penyediaan sarana prasarana, penyuluhan dan pengendalian dan penanggulangan penyakit
4. Fasilitasi ijin dan sertifikasi usaha pengolahan pangan

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp 13.218.029.642,- terurai dalam 9 program dan 30 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau meningkat dari tahun 2021, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Tabel T-C 30
Target Indikator Kinerja Tahun 2021 dan Realisasi Tahun sebelumnya

No	Indikator	Target	Realisasi		Capaian	Kenaikan/ Penurunan
			2020	2021		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	1,5%	1.52 %	1,73	115,33	13,81
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1,5%	2,63 %	2,01	134	-23,57
2.	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	3 %	4,99%	2,94	98	-41,08

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINKANNAK

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan dalam bidang Perikanan dan peternakan di Kabupaten Banyumas tahun 2021 adalah :

- a. Masih belum optimalnya Produksi Perikanan Budidaya
- b. Masih belum optimalnya Produksi Perikanan Tangkap
- c. Masih belum optimalnya produksi peternakan

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas peran strategis di bidang Perikanan dan Peternakan, sehingga perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu saja anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya Tujuan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas.

Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas menghadapi berbagai tantangan dan hambatan serta dukungan baik secara internal maupun eksternal yang dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Treatment). Analisis SWOT juga merupakan alat analisis untuk menyusun isu-isu strategis yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dan hambatan-hambatan yang mungkin akan dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan. Untuk lebih jelasnya hasil analisis SWOT sebagai berikut:

A. Strength (Kekuatan)

1. Faktor kekuatan yang mendukung terhadap pelaksanaan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang Perikanan, Pengembangan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. SDM Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 98 orang yang didominasi oleh pendidikan S2 dan S1. Dilihat dari pendidikan reguler, pegawai Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banyumas sudah cukup baik dan hal tersebut merupakan modal dasar dalam urusan pemerintahan daerah bidang perikanan, pengembangan perikanan, produksi peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
3. Sarana dan Prasarana
Dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas sudah cukup memadai, baik asset yang bergerak maupun tidak bergerak.
4. Adanya tupoksi yang jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021. Tupoksi yang

jelas merupakan modal dasar yang sangat penting, dan memberikan kekuatan yang jelas didalam melaksanakan tugas teknis operasional urusan pemerintahan daerah bidang Perikanan, pengembangan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

B. Weakness (Kelemahan)

Disamping kekuatan yang dimiliki didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan , pengembangan perikanan , peternakan dan kewan kesmavet, kita juga memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain:

1. Adanya masalah-masalah terkait dengan teknis operasional urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan peternakan antara lain:
 - Keterlibatan stakeholders dalam proses penyusunan teknis operasional belum optimal dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
 - Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi kegiatan sebagai bahan perencanaan kegiatan, sehingga perencanaan yang disusun belum bisa simultan dan komprehensif.
 - Masih adanya usulan-usulan kegiatan yang diajukan pada saat dokumen RKPD telah ditetapkan, sehingga kegiatan tersebut tidak tercover dalam dokumen RKPD.
 - Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum secara maksimal dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses Musrenbang.

C. Opportunity (Peluang)

Dari analisis strength dan weakness, perlunya menganalisis peluang-peluang yang dapat diciptakan dalam mendukung perencanaan teknis operasional

urusan pemerintahan daerah di bidang Perikanan, pengembangan perikanan, peternakan dan keswan kesmavet. Peluang-peluang tersebut adalah:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) yang diterapkan sehingga semakin leluasa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi publik;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain dalam peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen maupun program;
3. Kerjasama dengan pihak lain dalam bidang perencanaan pembangunan;
4. Komitmen perangkat daerah lain untuk melaksanakan sistem perencanaan dan dukungan database perencanaan dari Perangkat Daerah lain;
5. Adanya dukungan dari eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan;
6. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi;
7. Banyaknya Lembaga-Lembaga Litbang yang bisa menjadi mitra kerja;
8. Telah disusunnya produk-produk hukum yang memberikan kewenangan dan petunjuk dalam penyusunan proses perencanaan pembangunan.

D. Treatment (Ancaman)

Dalam melaksanakan tupoksinya Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas tidak lepas dari adanya ancaman yang akan mempengaruhi terhadap proses teknis operasional urusan pemerintahan daerah. Ancaman yang mungkin terjadi antara lain:

1. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme pembangunan partisipatif;
2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan;
3. Perbedaan persepsi tentang mekanisme perencanaan pembangunan antara legislatif dan eksekutif;
4. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi antar Perangkat Daerah;

5. Kebutuhan perencanaan dan implementasi pembangunan yang komprehensif dan saling terintegrasi;
6. Perubahan peraturan perundangan;
7. Kejadian luar biasa pandemi Covid-19.

Berdasarkan analisa SWOT diatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up* dan *top down*, yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banyumas mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup;
2. Adanya mekanisme teknis operasional perencanaan pembangunanan, penelitian dan pengembangan;
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;

4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan bidang perikanan, pengembangan perikanan, peternakan dan kesehatan hewan tersebut belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banyumas dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

- Kurangnya keterlibatan stakeholders pada proses penyusunan perencanaan pembangunan dalam mengkritisi usulan-usulan OPD.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan yang terkait dengan dokumen perencanaan
- Pelaksanaan perencanaan tidak tepat waktu karena mekanisme tahapan panjang dan melibatkan banyak pihak dengan peraturan perundangan yang dinamis
- Tuntutan pelaksanaan Musrenbang yang partisipatif masih belum terwujud secara maksimal karena belum sinergisnya kepentingan yang diakomodir

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, peternakan dan perikanan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banyumas tahun 2018 – 2023, maka strategi dan kebijakan yang telah ditempuh Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesesuaian capaian kinerja OPD terhadap RPJMD
2. Meningkatkan fasilitasi penerapan inovasi Teknologi
3. Meningkatkan kualitas dan penyebarluasan informasi perencanaan
4. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan bidang perikanan
5. Meningkatkan kualitas analisis perencanaan pembangunan peternakan
6. Meningkatkan pelayanan perkantoran
7. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan perangkat daerah

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Perangkat Daerah. Secara keseluruhan hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada lampiran tabel C-T.31. Rancangan awal RKPD Tahun 2023 menunjukkan Dinas Perikanan dan Peternakan memiliki 9 program dan 30 kegiatan.

Tabel T-C.31
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN DAERAH
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Banyumas

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	13,836,038,000				13,886,865,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12,606,940,000				12,657,767,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000				100,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		50,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,793,757,000				10,793,757,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,701,769,000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola		10,701,769,000
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	91,988,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola		91,988,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	694,000,000				694,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		290,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	404,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		404,000,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	183,510,000				233,510,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83,510,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	barang milik daerah yang tersedia		83,510,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	barang milik daerah yang tersedia		50,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	barang milik daerah yang tersedia		100,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	381,500,000				381,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		104,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	277,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	jasa pelayanan umum kantor yang tersedia		277,500,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454,173,000				455,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	99,173,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pemeliharaan barang / gedung milik daerah		100,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pemeliharaan barang / gedung milik daerah		50,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	255,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pemeliharaan barang / gedung milik daerah		255,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	pemeliharaan barang / gedung milik daerah		50,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	75,598,000				75,598,000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	25,000,000				25,000,000
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	usaha penangkapan ikan		25,000,000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,598,000				50,598,000
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	50,598,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok nelayan kecil		50,598,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	978,500,000				978,500,000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	150,000,000				150,000,000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok pembudidaya ikan		50,000,000
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok pembudidaya ikan		25,000,000

Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kelompok pembudidaya ikan		75,000,000
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000				25,000,000
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembudidaya ikan		25,000,000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	803,500,000				803,500,000
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembudidaya ikan		25,000,000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembudidaya ikan		100,000,000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	628,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembudidaya ikan		628,500,000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembudidaya ikan		50,000,000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	50,000,000				50,000,000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	50,000,000				50,000,000
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Perairan umum		50,000,000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	125,000,000				125,000,000
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	25,000,000				25,000,000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	unit usaha pengolah hasil perikanan	0 dokumen	25,000,000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50,000,000				50,000,000
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	unit usaha pengolahan hasil perikanan		50,000,000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	50,000,000				50,000,000
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	unit pengolah hasil perikanan		50,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1,208,598,364				1,408,598,364

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	525,000,000				725,000,000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	100,000,000				100,000,000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pengawasan sarana pertanian		100,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	25,000,000				25,000,000
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kawasan sumber bibit ternak		25,000,000
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000				50,000,000
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Bibit ternak		50,000,000
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	25,000,000				25,000,000
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit Pengecer Obat hewan	0 Laporan	25,000,000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	325,000,000				525,000,000
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	300,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peredaran Bibit Ternak		500,000,000
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peredaran Bibit Ternak		25,000,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	225,000,000				225,000,000
Pembangunan Prasarana Pertanian	175,000,000				175,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kawasan ternak	0 unit	75,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	100,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kawasan ternak		100,000,000
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	50,000,000				50,000,000
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kawasan ternak		50,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	383,598,364				383,598,364

Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	125,000,000				125,000,000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ternak besar, kecil dan unggas		50,000,000
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ternak besar, kecil dan unggas		50,000,000
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ternak besar, kecil dan unggas	0 Laporan	25,000,000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000				50,000,000
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ternak yang keluar masuk wilayah kabupaten	0 Laporan	35,000,000
Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Ternak yang keluar masuk wilayah kabupaten	0 Laporan	15,000,000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	57,598,364				57,598,364
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	57,598,364	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium		57,598,364
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	126,000,000				126,000,000
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	50,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	unit usaha hasil peternakan		50,500,000
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	50,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	unit usaha hasil peternakan		50,500,000
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	unit usaha hasil peternakan	0 Laporan	25,000,000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	25,000,000				25,000,000
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rumah Potong Hewan		25,000,000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	75,000,000				75,000,000
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	50,000,000				50,000,000
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Unit usaha peternakan		50,000,000

Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	25,000,000				25,000,000
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	unit usaha pengecer obat hewan	0 Laporan	25,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	229,884,584				139,884,584
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	229,884,584				139,884,584
Administrasi Umum Perangkat Daerah	20,000,000				20,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum UPT Pusat Kesehatan Hewan		20,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	119,884,584				119,884,584
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,884,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa pelayanan umum UPT Puskesmas		29,884,584
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa pelayanan umum UPT Puskesmas		90,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90,000,000				0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	90,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang milik daerah		0
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	339,884,584				334,884,584
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	339,884,584				334,884,584
Administrasi Umum Perangkat Daerah	25,000,000				20,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Umum UPT Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan ternak		20,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289,884,584				289,884,584
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,884,584	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa Pelayanan Umum UPT Perbibitan ternak dan Hijauan pakan ternak		29,884,584
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	260,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa Pelayanan Umum UPT Perbibitan ternak dan Hijauan pakan ternak		260,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,000,000				25,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang milik daerah UPT Perbibitan ternak dan Hijauan Pakan ternak		25,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	228,499,801				228,499,801
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	228,499,801				228,499,801
Administrasi Umum Perangkat Daerah	24,999,900				24,999,900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,999,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi Umum UPT BPBAT		24,999,900
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178,499,901				178,499,901
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,999,901	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa Penunjang urusan UPT BPBAT		49,999,901
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	128,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa Penunjang urusan UPT BPBAT		128,500,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,000,000				25,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang milik daerah UPT BPBAT		25,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	74,999,901				74,999,901
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	74,999,901				74,999,901
Administrasi Umum Perangkat Daerah	25,000,000				25,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Administrasi umum Rumah Potong Hewan		25,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49,999,901				49,999,901
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	49,999,901	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa Penunjang Rumah Potong hewan		49,999,901
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	225,000,000				225,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	225,000,000				225,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	200,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Jasa Penunjang Rumah Potong hewan		200,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25,000,000				25,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Barang milik daerah di UPT Rumah Potong Hewan		25,000,000
	16,142,905,234				16,298,732,234

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kab. Banyumas mengakomodir usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kab. Banyumas maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan penelitian lapangan serta pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan pada tahun 2023 belum terakomodir dalam Renja Dinkannak.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2023 pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023. Selain itu prioritas pembangunan merupakan program kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Tema Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2023 adalah ***“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”***. Dalam Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2023 ada 7 prioritas Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RKP 2022 yang mana kebijakannya diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi struktural adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan pembangunan Jawa Tengah Tahun 2023 ditujukan pada "**Peningkatan perekonomian Daerah**

dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan Sumber Daya Manusia", dengan prioritas daerah diarahkan pada:

1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana
2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas SDM menuju SDM berdaya saing
4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

Prioritas Pembangunan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 sesuai RPJMD tahun 2018-2023 mempertimbangkan isu pembangunan global, nasional dan isu strategis pembangunan daerah, maka Prioritas Daerah dirumuskan untuk memberikan panduan dan penekanan agar kebijakan-kebijakan yang dirumuskan mampu membawa kearah yang tepat, optimal dan sinergi satu sama lain, sehingga semua program dan kegiatan yang dirumuskan dapat menghasilkan output dan capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 untuk **Peningkatan ekonomi dengan penguatan daya saing ekonomi dan SDM** dengan mempertimbangkan prioritas nasional, maka Kabupaten Banyumas melakukan penyesuaian prioritas Tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

- 1 Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan kualitas lingkungan hidup
- 2 Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
- 3 Peningkatan kualitas infrastruktur untuk memperkuat daya saing daerah
- 4 Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia

5 Pengembangan smart government dalam peningkatan kualitas pelayanan publik

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINKANNAK

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi factor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan yang melaksanakan pembangunan bidang Perikanan dan Peternakan di Kab. Banyumas, membantu Bupati Banyumas dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan dan peternakan dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk perikanan dan peternakan. Rencana pembangunan disesuaikan dengan visi misi RPJMD 2018-2023. **"Menjadikan Banyumas yang Maju, Adil Makmur dan Mandiri"**

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 dijabarkan kedalam delapan misi atau yang dikenal dengan Hasta Krida. Misi yang terkait dan menjadi fokus kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas yaitu: ***Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.***

Adapun tujuan dan sasaran dalam Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kab. Banyumas Tahun 2023 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Kab. Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Meningkatnya produksi perikanan dan peternakan	Meningkatnya Produksi perikanan budidaya
	Meningkatnya produksi perikanan tangkap
	Meningkatnya produksi peternakan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai dinas yang melaksanakan pembangunan bidang perikanan dan peternakan di Kab. Banyumas menyusun perencanaan sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan dalam rangka mendukung Bupati Banyumas dalam mencapai visi misi yang telah ditetapkan.

Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai 9 program dan 30 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh empat bidang dan sekretariat. Berikut merupakan total kebutuhan dana Tahun 2023 yaitu Rp 13.917.336.000,00. Berikut lampiran rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 pada table T-C.33:

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Banyumas

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	RKPD Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			APBD KAB		APBD Prop	APBN	Target	Pagu Indikatif
			Target 2023	Pagu Indikatif				
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				11,692,336,000				14,097,727,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	10,887,336,000	0	0	100 %	12,699,779,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun DINKANNAK	dokumen	3 dokumen	80,000,000	0	0	3 dokumen	100,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	40,000,000	0	0	2 Dokumen	50,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	40,000,000	0	0	1 Laporan	50,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola DINKANNAK	jenis	2 jenis	9,279,029,849	0	0	2 jenis	10,801,769,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 Orang/bulan	9,179,029,849	0	0	100 Orang/bulan	10,701,769,000

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	100,000,000	0	0	12 Dokumen	100,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dikelola DINKANNAK	jenis	2 jenis	610,000,000	0	0	2 jenis	763,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	210,000,000	0	0	7 Paket	319,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	400,000,000	0	0	100 Laporan	444,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia di DINKANNAK	jenis	3 jenis	200,000,000	0	0	3 jenis	193,510,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	50,000,000	0	0	5 Unit	83,510,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	150,000,000	0	0	5 Unit	55,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia di DINKANNAK	jenis	2 jenis	468,306,151	0	0	2 jenis	381,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	100,000,000	0	0	12 Laporan	104,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	368,306,151	0	0	12 Laporan	277,500,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan DINKANNAK	jenis	4 jenis	250,000,000	0	0	4 jenis	460,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		78 Unit	90,000,000	0	0	78 Unit	100,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	40,000,000	0	0	10 Unit	50,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	120,000,000	0	0	3 Unit	255,000,000

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	956.46 Ton	60,000,000	0	0	956.46 Ton	83,098,000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha penangkapan ikan yang diawasi	kelompok	2 kelompok	15,000,000	0	0	2 kelompok	27,500,000
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		3 Dokumen	15,000,000	0	0	3 Dokumen	27,500,000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok nelayan yang naik kelas	%	10 %	45,000,000	0	0	10 %	55,598,000
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		5 Orang	45,000,000	0	0	5 Orang	55,598,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11599.65 Ton	595,000,000	0	0	11599.65 Ton	1,122,350,000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang naik kelas	%	5 %	120,000,000	0	0	5 %	157,500,000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		5 Kelompok	45,000,000	0	0	5 Kelompok	55,000,000
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		11 Kelompok	25,000,000	0	0	11 Kelompok	27,500,000
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		20 Kelompok	50,000,000	0	0	20 Kelompok	75,000,000
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDPIK yang diterbitkan	berkas	100 berkas	20,000,000	0	0	100 berkas	25,000,000
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Rekomendasi	20,000,000	0	0	50 Rekomendasi	25,000,000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen Analisa Usaha Perikanan Budidaya yang disusun	dokumen	3 dokumen	455,000,000	0	0	3 dokumen	939,850,000

Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 dokumen	15,000,000	0	0	3 dokumen	27,500,000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	50,000,000	0	0	1 Unit	110,000,000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		9 Unit	300,000,000	0	0	9 Unit	692,350,000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		3 Dokumen	40,000,000	0	0	3 Dokumen	55,000,000
Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi		5 Ha	50,000,000	0	0	5 Ha	55,000,000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	lokasi	20 lokasi	50,000,000	0	0	20 lokasi	55,000,000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pokmaswas yang terbentuk	kelompok	2 kelompok	50,000,000	0	0	2 kelompok	55,000,000
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		4 Dokumen	50,000,000	0	0	4 Dokumen	55,000,000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	200.06 Ton	100,000,000	0	0	200.06 Ton	137,500,000
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha yang diterbitkan	berkas	100 berkas	15,000,000	0	0	100 berkas	27,500,000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		4 dokumen	15,000,000	0	0	4 dokumen	27,500,000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi kelayakan pengolahan hasil perikanan yang dibuat	dokumen	1 dokumen	35,000,000	0	0	1 dokumen	55,000,000

Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		5 Unit Usaha	35,000,000	0	0	5 Unit Usaha	55,000,000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang difasilitasi	pelaku usaha	1 pelaku usaha	50,000,000	0	0	1 pelaku usaha	55,000,000
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		1 Pelaku Usaha	50,000,000	0	0	1 Pelaku Usaha	55,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1,325,000,000				1,574,000,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Populasi Ternak	%	3 %	655,000,000	0	0	3 %	847,500,000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ternak unggul dalam kawasan	%	10 %	25,000,000	0	0	10 %	27,500,000
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		2 Dokumen	25,000,000	0	0	2 Dokumen	27,500,000
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis pakan ternak sesuai SNI	%	50 %	25,000,000	0	0	50 %	55,000,000
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar		4 Laporan	25,000,000	0	0	4 Laporan	55,000,000
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi	pengecer	10 pengecer	15,000,000	0	0	10 pengecer	27,500,000
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		4 Laporan	15,000,000	0	0	4 Laporan	27,500,000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi ternak dan HPT unggul yang disusun	dokumen	1 dokumen	515,000,000	0	0	1 dokumen	527,500,000
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		16 Ekor	500,000,000	0	0	16 Ekor	500,000,000
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat		40 Ekor	15,000,000	0	0	40 Ekor	27,500,000
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kelompok yang diberikan hibah	kelompok	0 kelompok	75,000,000	0	0	0 kelompok	110,000,000

Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		20 ekor	75,000,000	0	0	20 ekor	110,000,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kawasan ternak yang dikelola	%	20 %	225,000,000	0	0	20 %	237,000,000
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan	jenis	2 jenis	200,000,000	0	0	2 jenis	182,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		3 Unit	150,000,000	0	0	3 Unit	82,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	50,000,000	0	0	1 Unit	100,000,000
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan sumber bibit ternak yang dibina	kawasan	1 kawasan	25,000,000	0	0	1 kawasan	55,000,000
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan		2 Laporan	25,000,000	0	0	2 Laporan	55,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dokumen Peta sebaran penyakit hewan	Dokumen	1 Dokumen	410,000,000	0	0	1 Dokumen	414,500,000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kejadian penyakit hewan	%	10 %	125,000,000	0	0	10 %	137,500,000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		2 Laporan	50,000,000	0	0	2 Laporan	55,000,000
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Laporan	50,000,000	0	0	2 Laporan	55,000,000
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		2 Laporan	25,000,000	0	0	2 Laporan	27,500,000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang diterbitkan	berkas	1016 berkas	60,000,000	0	0	1016 berkas	53,500,000
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		2 Laporan	35,000,000	0	0	2 Laporan	38,500,000

Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		2 Laporan	25,000,000	0	0	2 Laporan	15,000,000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian penyakit hewan terlapor yang ditangani	%	100 %	50,000,000	0	0	100 %	60,000,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		4 Laporan	50,000,000	0	0	4 Laporan	60,000,000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang mengajukan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	unit	2 unit	125,000,000	0	0	2 unit	138,500,000
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		4 Laporan	50,000,000	0	0	4 Laporan	55,500,000
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan		2 Laporan	50,000,000	0	0	2 Laporan	55,500,000
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		2 Dokumen	25,000,000	0	0	2 Dokumen	27,500,000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang dihasilkan	kg	400000 kg	50,000,000	0	0	400000 kg	25,000,000
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		4 Laporan	50,000,000	0	0	4 Laporan	25,000,000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang berizin	%	1 %	35,000,000	0	0	1 %	75,000,000
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomtek yang diterbitkan	rekomendasi	1 rekomendasi	20,000,000	0	0	1 rekomendasi	50,000,000
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		2 Dokumen	20,000,000	0	0	2 Dokumen	50,000,000
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Prosentase usaha pengecer obat hewan yang berizin	%	1 %	15,000,000	0	0	1 %	25,000,000

Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi		20 Laporan	15,000,000	0	0	20 Laporan	25,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				111,918,600				243,000,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	111,918,600	0	0	100 %	243,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola UPT PUSKESWAN	jenis	1 jenis	13,327,800	0	0	1 jenis	22,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	13,327,800	0	0	7 Paket	22,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia di DINKANNAK	jenis	2 jenis	98,590,800	0	0	2 jenis	121,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	22,602,000	0	0	12 Laporan	31,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	75,988,800	0	0	12 Laporan	90,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				301,374,000				369,500,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	301,374,000	0	0	100 %	369,500,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola UPT Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jenis	1 Jenis	13,500,000	0	0	1 Jenis	27,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	13,500,000	0	0	2 Paket	27,500,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia UPT PUSKESWAN	jenis	2 jenis	269,624,000	0	0	2 jenis	317,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	28,328,000	0	0	12 Laporan	31,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	241,296,000	0	0	12 Laporan	286,000,000

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan UPT Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	jenis	1 jenis	18,250,000	0	0	1 jenis	25,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	18,250,000	0	0	1 Unit	25,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				222,096,600				230,999,801
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	222,096,600	0	0	100 %	230,999,801
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar	jenis	1 jenis	21,750,000	0	0	1 jenis	24,999,900
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	21,750,000	0	0	2 Paket	24,999,900
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia di DINKANNAK	jenis	2 jenis	188,346,600	0	0	2 jenis	178,499,901
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	43,569,000	0	0	12 Laporan	49,999,901
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	144,777,600	0	0	12 Laporan	128,500,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar	jenis	1 jenis	12,000,000	0	0	1 jenis	27,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	12,000,000	0	0	2 Unit	27,500,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				80,201,000				74,999,901

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	80,201,000	0	0	100 %	74,999,901
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola UPT Rumah Potong Hewan	jenis	1 jenis	20,750,000	0	0	1 jenis	25,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	20,750,000	0	0	5 Paket	25,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia di DINKANNAK	jenis	2 jenis	59,451,000	0	0	2 jenis	49,999,901
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	59,451,000	0	0	12 Laporan	49,999,901
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				184,409,800				227,500,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	184,409,800	0	0	100 %	227,500,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	170,909,800	0	0	12 Laporan	200,000,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan UPT Rumah Potong Hewan	jenis	1 jenis	13,500,000	0	0	1 jenis	27,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	13,500,000	0	0	1 Unit	27,500,000
				13,917,336,000				16,817,726,702

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 ditunjukkan pada lampiran matrik renja yang telah disesuaikan dengan Renstra Perubahan 2018-2023 sebagai berikut:

**Matrik Tahun 2023 berdasarkan Renstra Perubahan 2018-2023
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
Kabupaten Banyumas**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	RKPD Tahun 2023				Total
			APBD KAB		APBD Prop	APBN	
			Target 2023	Pagu Indikatif			
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				11,692,336,000			11,692,336,000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinkannak	%	100 %	10,887,336,000	0	0	10,887,336,000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun DINKANNAK	dokumen	3 dokumen	80,000,000	0	0	80,000,000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	40,000,000	0	0	40,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 Laporan	40,000,000	0	0	40,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola DINKANNAK	jenis	2 jenis	9,279,029,849	0	0	9,279,029,849
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 Orang/bulan	9,179,029,849	0	0	9,179,029,849
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 Dokumen	100,000,000	0	0	100,000,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum yang dikelola DINKANNAK	jenis	2 jenis	610,000,000	0	0	610,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	210,000,000	0	0	210,000,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 Laporan	400,000,000	0	0	400,000,000

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia di DINKANNAK	jenis	3 jenis	200,000,000	0	0	200,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		5 Unit	50,000,000	0	0	50,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	150,000,000	0	0	150,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia di DINKANNAK	jenis	2 jenis	468,306,151	0	0	468,306,151
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	100,000,000	0	0	100,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	368,306,151	0	0	368,306,151
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan DINKANNAK	jenis	4 jenis	250,000,000	0	0	250,000,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		78 Unit	90,000,000	0	0	90,000,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	40,000,000	0	0	40,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 Unit	120,000,000	0	0	120,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	956.46 Ton	60,000,000	0	0	60,000,000
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah usaha penangkapan ikan yang diawasi	kelompok	2 kelompok	15,000,000	0	0	15,000,000
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia		3 Dokumen	15,000,000	0	0	15,000,000
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelompok nelayan yang naik kelas	%	10 %	45,000,000	0	0	45,000,000

Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya		5 Orang	45,000,000	0	0	45,000,000
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	11599.65 Ton	595,000,000	0	0	595,000,000
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase kelompok pembudidaya ikan yang naik kelas	%	5 %	120,000,000	0	0	120,000,000
Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas		5 Kelompok	45,000,000	0	0	45,000,000
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan		11 Kelompok	25,000,000	0	0	25,000,000
Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		20 Kelompok	50,000,000	0	0	50,000,000
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah TDPIK yang diterbitkan	berkas	100 berkas	20,000,000	0	0	20,000,000
Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota		50 Rekomendasi	20,000,000	0	0	20,000,000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah dokumen Analisa Usaha Perikanan Budidaya yang disusun	dokumen	3 dokumen	455,000,000	0	0	455,000,000
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		3 dokumen	15,000,000	0	0	15,000,000
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		1 Unit	50,000,000	0	0	50,000,000
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		9 Unit	300,000,000	0	0	300,000,000
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan		3 Dokumen	40,000,000	0	0	40,000,000

Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi		5 Ha	50,000,000	0	0	50,000,000
PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Perairan Umum Yang Ter Re Stocking Ikan	lokasi	20 lokasi	50,000,000	0	0	50,000,000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah pokmaswas yang terbentuk	kelompok	2 kelompok	50,000,000	0	0	50,000,000
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		4 Dokumen	50,000,000	0	0	50,000,000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi olahan hasil perikanan	Ton	200.06 Ton	100,000,000	0	0	100,000,000
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Tanda Daftar Usaha yang diterbitkan	berkas	100 berkas	15,000,000	0	0	15,000,000
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko		4 dokumen	15,000,000	0	0	15,000,000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Rekomendasi kelayakan pengolahan hasil perikanan yang dibuat	dokumen	1 dokumen	35,000,000	0	0	35,000,000
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko		5 Unit Usaha	35,000,000	0	0	35,000,000
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pelaku usaha olahan hasil perikanan yang difasilitasi	pelaku usaha	1 pelaku usaha	50,000,000	0	0	50,000,000

Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		1 Pelaku Usaha	50,000,000	0	0	50,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				1,325,000,000			
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan Populasi Ternak	%	3 %	655,000,000	0	0	655,000,000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase ternak unggul dalam kawasan	%	10 %	25,000,000	0	0	25,000,000
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		2 Dokumen	25,000,000	0	0	25,000,000
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis pakan ternak sesuai SNI	%	50 %	25,000,000	0	0	25,000,000
Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar		4 Laporan	25,000,000	0	0	25,000,000
Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah pengecer obat hewan yang diawasi	pengecer	10 pengecer	15,000,000	0	0	15,000,000
Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar		4 Laporan	15,000,000	0	0	15,000,000
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen informasi ternak dan HPT unggul yang disusun	dokumen	1 dokumen	515,000,000	0	0	515,000,000
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar		16 Ekor	500,000,000	0	0	500,000,000
Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat		40 Ekor	15,000,000	0	0	15,000,000
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kelompok yang diberikan hibah	kelompok	0 kelompok	75,000,000	0	0	75,000,000
Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain		20 ekor	75,000,000	0	0	75,000,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase kawasan ternak yang dikelola	%	20 %	225,000,000	0	0	225,000,000

Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah jenis pembangunan Infrastruktur di bidang pertanian yang dilaksanakan	jenis	2 jenis	200,000,000	0	0	200,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		3 Unit	150,000,000	0	0	150,000,000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara		1 Unit	50,000,000	0	0	50,000,000
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kawasan sumber bibit ternak yang dibina	kawasan	1 kawasan	25,000,000	0	0	25,000,000
Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan		2 Laporan	25,000,000	0	0	25,000,000
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dokumen Peta sebaran penyakit hewan	Dokumen	1 Dokumen	410,000,000	0	0	410,000,000
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase penurunan angka kejadian penyakit hewan	%	10 %	125,000,000	0	0	125,000,000
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis		2 Laporan	50,000,000	0	0	50,000,000
Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		2 Laporan	50,000,000	0	0	50,000,000
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali		2 Laporan	25,000,000	0	0	25,000,000
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang diterbitkan	berkas	1016 berkas	60,000,000	0	0	60,000,000
Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan		2 Laporan	35,000,000	0	0	35,000,000

Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan		2 Laporan	25,000,000	0	0	25,000,000
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kejadian penyakit hewan terlapor yang ditangani	%	100 %	50,000,000	0	0	50,000,000
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		4 Laporan	50,000,000	0	0	50,000,000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha yang mengajukan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	unit	2 unit	125,000,000	0	0	125,000,000
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		4 Laporan	50,000,000	0	0	50,000,000
Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan		2 Laporan	50,000,000	0	0	50,000,000
Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner		2 Dokumen	25,000,000	0	0	25,000,000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Daging Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang dihasilkan	kg	400000 kg	50,000,000	0	0	50,000,000
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan		4 Laporan	50,000,000	0	0	50,000,000
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase usaha peternakan yang berizin	%	1 %	35,000,000	0	0	35,000,000
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah rekomtek yang diterbitkan	rekomendasi	1 rekomendasi	20,000,000	0	0	20,000,000
Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		2 Dokumen	20,000,000	0	0	20,000,000
Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Prosentase usaha pengecer obat hewan yang berizin	%	1 %	15,000,000	0	0	15,000,000
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi		20 Laporan	15,000,000	0	0	15,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				111,918,600			

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	111,918,600	0	0	111,918,600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola UPT PUSKESWAN	jenis	1 jenis	13,327,800	0	0	13,327,800
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket	13,327,800	0	0	13,327,800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia di DINKANNAK	jenis	2 jenis	98,590,800	0	0	98,590,800
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	22,602,000	0	0	22,602,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	75,988,800	0	0	75,988,800
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				301,374,000			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	301,374,000	0	0	301,374,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola UPT Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jenis	1 Jenis	13,500,000	0	0	13,500,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	13,500,000	0	0	13,500,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia UPT PUSKESWAN	jenis	2 jenis	269,624,000	0	0	269,624,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	28,328,000	0	0	28,328,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	241,296,000	0	0	241,296,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan UPT Perbibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	jenis	1 jenis	18,250,000	0	0	18,250,000

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	18,250,000	0	0	18,250,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				222,096,600			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	222,096,600	0	0	222,096,600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar	jenis	1 jenis	21,750,000	0	0	21,750,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2 Paket	21,750,000	0	0	21,750,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia di DINKANNAK	jenis	2 jenis	188,346,600	0	0	188,346,600
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	43,569,000	0	0	43,569,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	144,777,600	0	0	144,777,600
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan UPT Balai Pengembangan Budidaya Air Tawar	jenis	1 jenis	12,000,000	0	0	12,000,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		2 Unit	12,000,000	0	0	12,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				80,201,000			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	80,201,000	0	0	80,201,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola UPT Rumah Potong Hewan	jenis	1 jenis	20,750,000	0	0	20,750,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	20,750,000	0	0	20,750,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia di DINKANNAK	jenis	2 jenis	59,451,000	0	0	59,451,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	59,451,000	0	0	59,451,000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				184,409,800			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Dinnkanak	%	100 %	184,409,800	0	0	184,409,800
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	170,909,800	0	0	170,909,800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan UPT Rumah Potong Hewan	jenis	1 jenis	13,500,000	0	0	13,500,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	13,500,000	0	0	13,500,000
				13,917,336,000			13,917,336,000

BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan menjadi acuan dalam rangka menyusun Rancangan Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 berpedoman pada dokumen RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dan Rencana Strategis Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra Perubahan-OPD) Tahun 2018-2023 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, dan APBN.
2. Dinas Perikanan dan Peternakan dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya.
3. Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2023.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Kabupaten Banyumas Tahun 2023 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.